

# PETRUK DADI RATU

## SIMBOL PERLAWANAN RAJA-RAJA JAWA

**Harto Juwono**

Staf pengajar Program Studi Ilmu Sejarah  
Fakultas Ilmu Budaya UNS  
[hartojuwonomtl@gmail.com](mailto:hartojuwonomtl@gmail.com)

### **Abstract**

*This article is the result of literature study and archival research which is carried out with the aim of revealing the meaning and impact of the existence of the story of Petruk Dadi Ratu in the world of Javanese culture and politics during the king regime. In an atmosphere of structural domination by the colonial regime, the emergence of wayang and stories represented a response from the kings and the societies through arts and culture towards colonial hegemony. For this reason, the method used in this research is a structural history methodology which also includes historical research methods, with a semiotic approach to obtain appropriate interpretation results on the symbolism attached to the object. The data used in this paper is textual data as well as observing the form of the Petruk puppet as a king in both Surakarta and Yogyakarta styles. As a conclusion from this research, Petruk Dadi Ratu is a successful form of Javanese response in the aesthetic values that grow in its arts and cultures towards the forms of foreign power in all areas of life.*

**Keywords:** Petruk, Ratu, Javanese, Colonial

### **Pengantar**

Dalam masyarakat Jawa, khususnya di kalangan pemerhati dan penggemar seni pewayangan Jawa, tokoh Petruk bukan merupakan sosok yang asing. Meskipun statusnya sebagai *panakawan*,<sup>1</sup> keberadaan Petruk dalam seni pewayangan Jawa (yang berbeda dengan India dan juga dengan tradisi dan kisah pewayangan era Kerajaan Hindu) menduduki peranan penting baik dalam epos Mahabarata maupun Ramayana yang sudah digubah menjadi alur cerita wayang Jawa.

Sebagai bagian dari *panakawan* dan menjadi putra Semar, sosok *panakawan* yang dianggap sebagai titisan dewa, Petruk memiliki fungsi ganda: di satu sisi ia menjadi bagian tak terpisahkan dari *panakawan* yang dipercaya mengasuh para tokoh positif yang menjadi pelaku utama dalam kedua epos itu, di sisi lain Petruk bisa tampil sendiri dan menjadi tokoh

dalam sejumlah kisah. Meskipun kisah yang menampilkan tokoh Petruk sebagai sosok tunggal dan dominan merupakan kisah karangan (*carangan*) dari arus besar (*main-stream*) terutama Mahabarata, penampilannya menuntut perhatian public dan menegaskan peran dan statusnya yang patut dipertimbangkan dalam struktur hubungan antara kalangan elite dan abdi (*kawula-gusti*).

Sejumlah cerita menampilkan Petruk dalam perannya sebagai tokoh tunggal yang dominan, termasuk cerita Petruk Dadi Ratu (Petruk menjadi raja). Dalam kisah ini, Petruk mengangkat dirinya menjadi raja dengan modal kesaktian yang diperolehnya dari penguasaan atas pusaka Ngamarta, Kalimasada.<sup>2</sup> Akan tetapi artikel ini tidak akan membahas kisah tersebut, melainkan akan menyoroti pembuatan kisah itu sendiri yang ternyata memiliki latar belakang khusus ketika diletakkan dalam konteks perkembangan politik pada zamannya.

Dalam artikel ini, ada dua focus utama yang dibahas yaitu kisah Petruk menjadi raja dan penampilan wayang Petruk dengan busana raja. Kisah ini bisa dijumpai sebagai bentuk kisah karangan di Kesunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Apa yang menarik untuk diperhatikan di sini adalah bahwa kemunculan kisah dan wayang Petruk menjadi raja berlangsung hampir bersamaan, yaitu pada dekade 1870an ketika Kesunanan Surakarta diperintah oleh Sunan Paku Buwono IX dan Kesultanan Yogyakarta diperintah oleh Sultan Hamengku Buwono VII.

Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini berusaha meletakkan kemunculan kisah dan sosok Petruk dalam konteks zamannya, khususnya berkaitan dengan kedua raja Jawa tersebut dan kebijakannya atau persoalan yang mereka hadapi. Dalam menyusun dan menampilkan kisah ini, tentu saja yang dimaksudkan oleh raja-raja Jawa bukan perwujudan Petruk sebagai symbol dari kedatangan Ratu Adil yang pada akhir abad XIX marak terjadi dalam gerakan social masyarakat<sup>3</sup>, mengingat kemunculan wayang dan kisah ini bersumber dari raja sendiri dan bukan dari kalangan rakyat untuk menandingi rajanya dalam puncak kekuasaan Jawa.<sup>4</sup> Dari situ akan diupayakan untuk mencoba menjawab pertanyaan apa sebenarnya sesuatu yang muncul di balik keberadaan sosok Petruk Dadi Ratu ini (*kasunyatan*).

Untuk menjawab pertanyaan di atas dan sekaligus untuk merangkai perkembangan yang terjadi terkait dengan topic penelitian, metodologi yang akan digunakan adalah metodologi ilmu sejarah mengingat peristiwa yang terjadi telah berlangsung lebih dari seratus tahun lalu dan bisa diklasifikasikan sebagai masa lampau. Untuk itu sumber informasi dari peristiwa diperoleh dari data, dan metolodi ilmu sejarah yang mencakup juga metode penelitian sejarah akan menjadi sarana yang tepat dalam menelusuri, menafsirkan dan merekonstruksinya kembali sehingga menjadi suatu bentuk kisah yang ditampilkan sebagai laporan penelitian.

Metodologi sejarah yang akan digunakan dalam hal ini adalah metodologi struktural, terutama yang dimunculkan oleh sejarawan

Australia Christopher Lloyd. Dengan mengembangkan teori struktural yang dicetuskan oleh Anthony Giddens, Lloyd menerapkan teori tersebut setelah disesuaikan dengan konteks peristiwa dan pelaku sejarah yang menjadi *agent* dalam proses interaksi mereka (*agency*) sehingga menimbulkan perubahan pada struktur. Mengingat menurut Lloyd aspek kekuasaan (*power*) cukup penting sebagai modal bagi *agent* untuk melakukan interaksi, penggunaan metodologinya dalam merekonstruksi peristiwa sejarah ini menjadi penting. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kedua raja Jawa yang memiliki ide untuk menciptakan bentuk wayang Petruk sebagai raja dan juga memerintahkan pujangganya untuk menyusun kisah tersebut memiliki kekuasaan untuk itu. Keduanya berniat untuk mengubah struktur yang ada dengan menggunakan kekuasaannya lewat jalur seni pewayangan, setidaknya menunjukkan reaksi mereka terhadap situasi structural yang terbentuk akibat interaksi mereka dengan dan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial terhadap Vorstenlanden pada akhir abad XIX.

Untuk menjelaskan hal tersebut, pernyataan Lloyd di bawah ini perlu dicermati

*Agency in general has two related meanings. First, it is the relatively autonomous power that an entity or part of a system has to produce an effect, that is to be an agent of a change or phenomenon. Second, it is the power that a person has to act on behalf of another, according to a certain remit or instruction, to try it bring about a result or outcome desired by the principal.<sup>5</sup>*

*Agency* pada umumnya memiliki dua makna yang terkait. Pertama, kekuatan otonom yang dimiliki oleh satuan atau bagian dari sistem membawa dampak, yang menjadikannya agen perubahan atau fenomena. Kedua, kekuasaan yang dimiliki orang untuk bertindak atas nama orang lain menurut suatu kewenangan atau instruksi tertentu, mencobanya untuk menciptakan suatu hasil atau akibat yang dikehendaki oleh pelakunya.

Keduanya memiliki tujuan akhir yang sama yaitu mewujudkan sesuatu yang dikehendaki dengan memanfaatkan kekuasaan yang dimilikinya, apakah dilakukannya sendiri sebagai bagian dari struktur ataukah melalui orang atau agent lain yang dikendalikan atau di bawah kekuasaannya untuk mewujudkan tujuannya. Dalam hal ini raja-raja Jawa di Yogyakarta dan Surakarta memiliki peluang untuk memenuhi kriteria keduanya.

Namun demikian selain menggunakan metodologi ilmu sejarah, kajian ini akan lebih tajam dalam menarik kesimpulan ketika menganalisis bentuk wayang Petruk dalam penampilannya sebagai raja. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa penampilan Prabu Petruk menunjukkan symbol-simbol khas pada zamannya yang berbeda dengan bentuk wayang klasik pada umumnya, melainkan lebih disesuaikan pada kondisi zaman pembuatan wayang itu. Oleh karenanya dengan pendekatan semiotic yang diambil dari ilmu linguistik diupayakan agar boneka wayang Petruk bisa berbicara menjelaskan maksud dari pembuatnya sekaligus kondisi zaman saat pembuatannya.

Karena dalam kaitan ini akan muncul banyak symbol sebagai tanda yang menyampaikan pesan dari pembuatnya, kajian semiotic Ferdinand de Saussure akan digunakan. Tujuannya adalah untuk bisa mendapatkan makna yang benar seperti yang melekat pada tanda-tanda dalam wayang Petruk sebagai raja, sekaligus menghubungkannya dengan konteks era atau kondisi pembuatannya. Dalam hal ini teori de Saussure tentang *signifiant et signifie* (penanda dan petanda) akan diterapkan dalam analisis.

Untuk itu penjelasan mengenai hal tersebut bisa dilihat demikian

*Language is a system of signs. The sign is the union of a form which signifies, which called as the signifiant (signifier), and an idea signified, the signifie (signified). Though it may speak of signifier and signified as if they were separate entities, they exist only as components of the sign. The sign is the central fact of language, and therefore in*

*trying to separate what is essential from what is secondary of incidental from the nature of the sign itself, its primary characteristics.<sup>6</sup>*

Bahasa merupakan sebuah sistem tanda. Tanda merupakan perpaduan suatu bentuk yang menandai, yang disebut penanda (*signifier*), dan suatu ide sebagai petanda, *signifie*. Meskipun bisa menyebut penanda dan petanda seolah-olah merupakan satuan terpisah, mereka hanya ada sebagai komponen dari tanda. Tanda menjadi fakta inti dari bahasa dan oleh karenanya dalam usaha memisahkan apa yang penting dari apa yang sekunder dari alam tanda sendiri, yaitu sifat dasarnya.

Dari penjelasan di atas bisa diketahui adanya tiga unsur yang dicetuskan oleh de Saussure dalam semiotiknya, yaitu tanda, penanda dan petanda. Ketiganya saling bersatu untuk memberikan suatu penjelasan tentang symbol yang disebut tanda itu. Tidak mungkin suatu penjelasan bisa diberikan jika salah satunya tidak ada.

Untuk itu de Saussure menjelaskan lebih lanjut sebagai berikut

*Language is always a combination or an interrelation of the signified and signifier. In the act of speech the signified always a concrete communication, meaningful only as a whole, while the signified in the system of language consisted of abstract syntactic, phraseological, morphological and lexical rules. The signifier aspect of the act of speech is the concrete sound flow, a physical phenomenon that can be perceived aurally. If the signified aspect of the system of language consists of rules according to which the world of meanings is cut into pieces and the resulting pieces are ordered, the signifier aspect of the system of language can consist only of rules according to which the phonic aspect of the act of speech is ordered.<sup>7</sup>*

Bahasa selalu merupakan perpaduan atau saling keterkaitan antara petanda dan penanda. Dalam bentuk tuturan, petanda

selalu merupakan komunikasi nyata, hanya bermakna seluruhnya ketika penanda dalam sistem bahasa mencakup kaidah sintaksis, fraseologi, morfologi dan aturan-aturan lexical. Aspek penanda tuturan adalah alur suara nyata, suatu fenomena fisik yang bisa dirasakan secara aural. Jika aspek petanda dari sistem bahasa mencakup aturan-aturan yang menurut alam makna diuraikan dalam potongan dan hasilnya bisa disusun, maka aspek penanda sistem bahasa itu hanya terdiri atas aturan yang menurutnya bisa mengatur aspek fonik tindakan tuturan.

Dalam penjelasan de Saussure di atas semakin jelas bahwa dua tindakan aktif terhadap tanda, yaitu penanda dan petanda akan menghasilkan penjelasan. Penanda dalam hal ini merupakan tindakan mengambil makna sementara petanda memuat aturan-aturan yang melingkupinya. Penyesuaian antara makna yang diperoleh dari tanda dan diletakkan dalam konteks aturan atau strukturnya akan menghasilkan penjelasan yang nyata tentang maksud tanda itu.

### **Situasi Politik dan Munculnya Wayang Petruk Ratu**

Setelah berakhirnya Perang Jawa pada bulan Maret 1830, pemerintah kolonial Belanda membuat kebijakan yang merugikan kerajaan-kerajaan Jawa. Dengan alasan untuk menutup deficit anggaran yang diakibatkan oleh perang, sekaligus untuk memberikan hukuman kepada para penguasa Jawa yang dianggap bertanggungjawab atas terjadinya peperangan selama lima tahun itu, Belanda mengambil keputusan untuk melakukan aneksasi wilayah kedua raja Jawa. Sasaran aneksasi ini adalah wilayah *Monconegoro* yang terletak di Madiun dan Kediri untuk sebelah timur dan Bagelen serta Banyumas di sebelah barat.<sup>8</sup> Dengan aneksasi demikian, yang disahkan melalui perjanjian selama tahun 1830, wilayah raja-raja di Vorstenlanden hanya menyisakan bekas tanah yang terdiri atas *Negara Agung* dan *Kuthagara* (Pajang dan Sokawati milik Surakarta, dan Mataram serta Gunung Kidul milik Kesultanan

Yogyakarta dengan beberapa petak lahan di Kulon Progo).

Meskipun secara ekonomi aneksasi wilayah ini diimbangi dengan pembayaran ganti rugi, bagi raja-raja Jawa persoalannya menyangkut kewibawaan dan hubungan sacral yang ada antara penguasa dan tanah atau kawulanya. Hilangnya wilayah bukan hanya merupakan kerugian ekonomi yang bisa diganti, namun juga menjadi kehilangan pengaruh dan hubungan langsung dengan kawula yang sebelumnya tinggal di tanah-tanah tersebut. Sebagai akibatnya kewibawaan raja Jawa akan merosot di mata rakyatnya dan kedudukannya digantikan oleh pemerintah kolonial. Hal ini mengakibatkan reaksi keras terutama dari Kesunanan Surakarta yang dibuktikan dengan tindakan Sunan Paku Buwono VI saat meninggalkan kraton pada pertengahan Juni 1830.<sup>9</sup>

Pemerintah Belanda segera mengambil tindakan di dua kraton dengan mengembalikan kestabilan politik lewat pengakuan terhadap dua raja baru: Paku Buwono VII di Kesunanan Surakarta dan Hamengku Buwono V di Kesultanan Yogyakarta. Mereka berdua disodori dengan perjanjian politik baru yang memungkinkan intervensi lebih luas oleh pemerintah kolonial terhadap persoalan internal di Vorstenlanden dan membuka wilayah ini bagi eksplorasi ekonomi lebih luas selama beberapa decade berikutnya.

Dalam kontrak yang dibuat pada tanggal 22 Juni 1830 pada pasal 3 tercantum ketentuan berikut ini

*Het Nederland Gouvernement zal mede aanstellen alle regenten en verdere Javaansche hoofden. In het algemeen zullen zij gekozen daarop regtmatige aanspraken hebben, en zal daarbij gelet worden op de aanbeveling door Z.H. den Soesoehoenan. Desniettemint zal bij gelegenheid van de feesten Gerbek een bepaald aantal regenten zich naar Soerakarta begeven, teneinde Z.H. den Soesoehoenan de verschuldigde eer te bewijzen.<sup>10</sup>*

Pemerintah Belanda juga akan mengangkat semua bupati dan pejabat Jawa lainnya. Pada umumnya mereka akan dipilih yang memiliki tuntutan sah dan akan diperhatikan petunjuk oleh Paduka Susuhunan. Namun pada kesempatan upacara Garebek sejumlah bupati tertentu berangkat ke Surakarta dengan tujuan menunjukkan penghormatan mereka kepada Paduka Susuhunan.

Dalam pasal tersebut di atas terlihat bagaimana kewenangan Sunan Surakarta atas sejumlah bupati yang daerahnya diambil alih oleh pemerintah Belanda mengalami kemerosotan, meskipun Belanda masih mengijinkan mereka hadir dalam upacara Garebek seperti sebelumnya. Dengan demikian terjadi dualisme kekuasaan: para bupati diangkat dan diberhentikan oleh Belanda tetapi menghaturkan penghormatan kepada Sunan.

Hal serupa juga terjadi dengan Sultan Hamengku Buwono V dalam kontraknya dengan Belanda tanggal 3 November 1830, yang pada pasal 5 tercatat sebagai berikut

*Z.H. Sultan zal in de landen, welke door het Gouvernement werden beheerd, zich onthouden van alle daden van gezag, Z.H. zal noch aan de Regenten, noch an de bevolking eenige bevelen geven dan alleen, wanneer dit door of vanwege het Gouvernement zal worden gevorderd, noch ook de Regenten en Hoofden schrijven of brieven zenden, en eindelijk ook van hen gene brieven, rapporten of verzoeken ontvangen.<sup>11</sup>*

Paduka Sultan tidak akan mengambil tindakan kekuasaan di tanah-tanah yang dikelola oleh pemerintah, tidak akan memberikan perintah kepada bupati atau kepada penduduk kecuali hanya ketika diperlukan oleh atau dari pihak pemerintah, juga tidak boleh menulis atau mengirim surat kepada para bupati dan kepala penduduk, dan akhirnya juga tidak boleh menerima surat, laporan atau permintaan dari mereka.

Pengurangan kewenangan secara drastis dalam pemerintahan dan hubungan kekuasaan di atas diikuti dengan eksploitasi ekonomi secara masif dalam bentuk pengambil alihan tanah-tanah *apanase* (tanah milik raja) oleh pengusaha swasta Eropa melalui perserwaan tanah yang diijinkan oleh pemerintah. Selama decade 1830 hingga 1840-an hampir semua tanah *apanase* baik milik raja maupun bangsawan atau aparat di Vorstenlanden berubah menjadi tanah perkebunan (*onderneming*) yang bukan hanya mengalihkan hak tanah namun juga hak memungut kerja wajib dari penduduknya.<sup>12</sup>

Selain pengurangan kekuasaan dan penguasaan tanah, kebijakan kolonial pada periode itu adalah memanfaatkan kelemahan posisi keuangan raja-raja Jawa. Di Yogyakarta, lahan yang sebagian besar hancur akibat peperangan, Sultan dan para bangsawan mengalami kesulitan ekonomi dan sebagai akibatnya mereka tidak mampu menolak tekanan kolonial ketika menuntut pengambil alihan sejumlah hak demi pembayaran hutang mereka dan deficit keuangan kraton. Beberapa hak yang diambil alih antara lain adalah penegakkan keamanan dan proses pengadilan yang sejak tahun 1831 menjadi kewenangan pemerintah kolonial.<sup>13</sup>

Dengan demikian selama periode 1830-an praktis kekuasaan Belanda telah ditegakkan secara tidak langsung di Vorstenlanden. Raja-raja Jawa kehilangan kewibawaan, kewenangan dan akhirnya secara ekonomi tergantung pada pemerintah kolonial yang beresiko juga kehilangan tanah-tanahnya. Posisi dominan pemerintah Belanda ini membuka kesempatan bagi masuknya semakin banyak pengaruh Barat dalam kehidupan social di kraton, baik di Surakarta maupun di Yogyakarta. Meningkatnya jumlah orang Eropa di pusat-pusat pemerintahan Jawa ini memberi mereka peluang untuk menyebarkan gaya hidup dan budaya Eropa lewat interaksinya dengan para bangsawan Jawa.<sup>14</sup>

Kondisi di atas berkembang sampai decade 1850-an tanpa adanya pergolakan baru. Hal ini menimbulkan anggapan di kalangan para pejabat tinggi di Batavia bahwa kondisi

Vorstenlanden mengalami kestabilan dan raja-raja Jawa tidak lagi mampu melakukan perlawanan terhadap tekanan, seperti halnya ketika pemerintah pada tahun 1857<sup>15</sup> menerbitkan peraturan yang mengatur persewaan tanah di Vorstenlanden. Persewaan ini memperkuat posisi orang Eropa di Vorstenlanden dengan hak sewa tanah mereka selama minimal dua puluh tahun, dan menyingkirkan bangsa lain (Timur Asing) untuk melakukan aktivitas ekonomi agraria di Vorstenlanden.<sup>16</sup> Akan tetapi para pejabat residen di Surakarta dan Yogyakarta menyadari bahwa semua itu hanya kondisi semu, karena mereka menduga adanya kekuatan yang tersembunyi di balik kenyataan dan khawatir bila suatu saat akan kembali terjadi perlawanan fisik seperti tahun 1825.<sup>17</sup>

Baik Sunan Paku Buwono VIII yang bertahta sejak bulan Mei 1858 maupun Sultan Hamengku Buwono V dan VI (sejak Juli 1855) menyadari kondisi ini dan mereka juga melihat bagaimana kekuasaannya semakin dipersempit oleh pemerintah kolonial. Ketika pada decade 1860an pemerintah kolonial meningkatkan pengaruh politiknya di Vorstenlanden, bentuk penentangan mulai ditunjukkan. Sunan Paku Buwono VIII dan kemudian dilanjutkan oleh Sunan Paku Buwono IX menunjukkan sikap reaksi keras terhadap kebijakan kolonial dalam bidang birokrasi.<sup>18</sup>

Sementara itu Sultan Hamengku Buwono VI yang baru saja berkuasa juga menunjukkan kekecewaannya kepada pemerintah kolonial. Khususnya kekecewaan ini berkisar dengan tanah yang menjadi kewenangannya. Meskipun ia telah mengajukan surat keberatan kepada pemerintah di Batavia dan sebuah komisi juga dibentuk, namun hasil penyelidikan yang dilakukan oleh komisi itu tetap tidak memadai dan Sultan tidak bisa mendapatkan tanah-tanahnya kembali yang masih dalam status persewaan oleh pengusaha perkebunan tebu dan kopi, terutama yang berada di perbatasan dengan wilayah Kesunanan Surakarta.<sup>19</sup>

Sultan Hamengku Buwono VII yang menggantikan ayahnya menjadi raja di Yogyakarta sejak 13 Agustus 1877 menghadapi

situasi yang buruk di kerajaannya, dan menduga bahwa sumber persoalan adalah kebijakan pemerintah Belanda di Kesultanan Yogyakarta serta meningkatnya pengaruh kehidupan budaya Barat di kalangan masyarakat Jawa. Untuk itu raja ini memutuskan berpaling kembali pada dunia spiritual dan budaya tradisional untuk memperkuat eksistensi kerajaannya dan sekaligus menghadapi tekanan kolonial.

Langkah sultan ini tampaknya juga selaras dengan apa yang dipikirkan oleh Sunan Paku Buwono IX, yang menduduki tahta sejak 30 Desember 1861. Situasi menjadi semakin kritis ketika penggunaan tanah di Vorstenlanden oleh investasi modal Eropa semakin tidak terkendali. Perluasan perkebunan, pembangunan irigasi pendukungnya, pembangunan infrastruktur transportasi khususnya kereta api, semuanya membagi-bagi lahan di Vorstenlanden dan mengurangi kewenangan raja serta peluang rakyat untuk memperoleh kesempatan produksi. Puncaknya terjadi ketika pada tahun 1884 pemerintah kolonial menerbitkan aturan baru tentang sewa tanah di Vorstenlanden.<sup>20</sup>

Akhirnya Sunan Paku Buwono IX menemukan ide dengan cara melakukan sindiran terhadap pemerintah pusat, khususnya Gubernur Jenderal O. van Rees yang pada pertengahan 1884 akan berkunjung ke Surakarta. Pada kesempatan itu Sunan memerintahkan abdi dalemnya untuk membuat sebuah wayang dari sosok *panakawan* Petruk yang diberi busana seorang raja. Pada saat yang sama, sebuah kisah tentang Petruk menjadi raja (*petruk dadi ratu*) juga disusun dan kemudian wayang serta kisah itu disiarkan kepada public. Residen Surakarta W.P.A. Mathes yang mengetahui hal itu merasa marah karena menuduh Sunan menghina Gubernur Jenderal dengan perwujudan wayang Petruk dan meminta agar Sunan tidak mementaskannya di depan public, dengan ancaman akan melaporkannya kepada Gubernur Jenderal.

Meskipun Sunan Paku Buwono IX memenuhi permintaan Mathes, akan tetapi gambar Petruk sebagai raja terlanjur keluar istana dan oleh public disambut baik. Bahkan dalam surat kabar umum yang terbit di Jawa

Tengah yakni *de Locomotief*, sebuah gambar Petruk yang berbusana raja ditampilkan pada akhir Oktober 1884 dan di bawahnya tertera tulisan “*Radja Olanda. Nama Doerginadoer heendraal, Inie Petroek*”.<sup>21</sup>

Melihat fenomena demikian, pemerintah Belanda segera mengambil tindakan dengan memerintahkan aparat kepolisian melakukan pemeriksaan. Dari penyelidikan yang dilakukan, sosok bernama Rekso Prawiro dituduh sebagai pembuatnya sementara sosok lain bernama Wongso Atmojo juga ditangkap sebagai penjual lukisan tersebut. Penjabat residen Surakarta kemudian memerintahkan agar mereka yang ditangkap segera diinterogasi dan diperiksa untuk mengetahui keterkaitan lebih lanjut persoalan ini.

Tampaknya pemerintah di Batavia yang menerima laporan dari residen Surakarta memandang serius tragedy Petruk menjadi raja ini. Pemerintah bahkan membentuk suatu komisi khusus untuk menyelidiki dan mencegah penyebaran atau penjualan wayang dan lukisan kartun dengan obyek Petruk. Di Solo sendiri bentuk gambar Petruk sudah menyebar di kalangan masyarakat dan mereka menyebutnya sebagai jenderal (*generaal*) Petruk.<sup>22</sup>

Pemerintah Belanda melihat serius terhadap adanya insiden Petruk menjadi raja ini, terutama dikaitkan dengan adanya potensi perlawanan. Mereka mencari alasan bahwa Petruk berasal dari zaman Hindu dan pada era itu tidak ada seragam seperti yang dikenakan dalam karikatur tersebut. Oleh karenanya mereka kemudian menduga adanya kesengajaan untuk melakukan penghinaan atau sindiran terhadap orang Belanda, khususnya kepada raja atau Gubernur Jeneral.<sup>23</sup>

Untuk itu mereka mengambil tindakan antara lain sebagai berikut

*Wat echter het treurigste in deze zaak is, is dat door al die berichten een onschuldige van zijne vrijheid is moeten beroofd worden. De politie moet uitgaan van aan de mogelijkheid van het bestaan van zulke prenten te geloven en, om het onderzoek met goed gevolgd te kunnen doen plaats*

*hebben, den prentenmaker voorloopog achter slot en rendel plaatsen.*<sup>24</sup>

Tetapi apa yang paling gawat dalam perkara ini adalah bahwa melalui semua berita ini seorang yang tidak bersalah kehilangan kebebasannya. Polisi harus bertolak dari kemungkinan adanya kepercayaan pada karitatur demikian dan untuk melakukan penyelidikan dengan hasil yang baik, pembuat karitatur untuk sementara harus dimasukkan dalam penjara dan digembok.

Keseriusan ini menjadi semakin berlebihan ketika Residen Surakarta berniat untuk meminta bantuan militer agar terlibat dalam penyelidikan perkara ini, meskipun oleh kalangan pers Belanda sendiri hal tersebut dianggap berlebihan.

Pers Belanda menganggap hal tersebut wajar dan menuduh adanya phobia yang berlebihan di kalangan aparat pemerintah. Antara lain sebuah tulisan dimuat dalam salah satu surat kabar yang terbit di Surakarta

*Ondanks het verschil van meaning met het Indische Vaderland blijven wij er bij dat dergelijke vertooningen ook van komieke poppen in generals uniform, gelijk staan met de karikaturen van den schoolmeester, die de jongen op zijn lei teekent, en met de bespotting van den Engelschen bobbij of politie agent in de Christmas pantomimes.*<sup>25</sup>

Meskipun ada perbedaan pandangan dengan harian *Het Indische Vaderland*, kami tetap bertahan bahwa pertunjukan boneka lucu dalam seragam jenderal ini bisa disamakan dengan kartikatur kepala sekolah yang mengajari para siswanya dan dengan ejekan pada agen polisi Inggris pada pantomime Natal.

Mengingat suratkabar *de Nieuwe Vorstenlanden* terbit dan berkedudukan di Surakarta, mungkin saja redaksi harian ini ingin meredam suasana yang memanas untuk menghindari konflik dengan penguasa swapraja, yang akan menimbulkan ketidakstabilan politik dan keamanan. Namun alasan yang disampaikannya juga bisa dianggap relevan dengan situasi sezaman saat itu, karena agenda

itu akan dialihkan pada nuansa seni daripada persoalan politik.

Di Yogyakarta, semangat yang sama juga muncul terkait dengan tokoh wayang Petruk. Dalam khasanah kisah wayangnya, Kesultanan Yogyakarta pada akhir abad XIX memerintahkan pembuatan wayang Petruk menjadi raja dan Petruk memakai busana Kompeni, serta menyusun kisahnya menjadi raja di sebuah kerajaan yang dikenal dengan nama Loji Tengara. Kisah ini menjadi terkenal ketika dipentaskan secara terbuka dalam bentuk pertunjukkan wayang kulit di masa Sultan Hamengku Buwono VII dan menjadi tontonan public. Meskipun tidak sekeras di Surakarta, penyebaran cerita Petruk menjadi Raja di Yogyakarta juga menjangkau kalangan public luas.<sup>26</sup>

### Analisis Persoalan

Meskipun di Vorstenlanden gema penampilan wayang dan kisah Petruk Dadi Ratu tetap terbatas pada nuansa seni dan tidak mengilhami ide perlawanan simbolis lebih lanjut, pemerintah Belanda tetap merasa khawatir terhadap keberadaannya. Terutama ini terjadi ketika kisah tersebut akhirnya keluar dari wilayah Vorstenlanden dan menyebar di wilayah pemerintah. Kekhawatiran pemerintah ini dibuktikan ketika pada decade kedua abad XX, sebuah komisi negara bagi perpustakaan rakyat dibentuk dan diberi tugas untuk menyelidiki tentang dampak dari cerita ini.

Dalam sebuah harian kolonial di Batavia, berita tentang hal itu dimuat berikut ini

*De regeering gaat voor met het aankweeken van minachting. Heeft niet de staatscommissie voor de volkslektuur in het licht gegeven een javaansche klucht "Petroek dados ratoe" en is die Petroek niet de geestig gepersiflerde intens geminachte Hollander? Wordt in dat van staatswege uitgegeven boekje niet uitsluitend opgezet tot minachting van de regeering in Indie? Waarom dient de regeering dan ook geen klacht in tegen de commissie voor de volkslektuur?<sup>27</sup>*

Pemerintah menghadapi pemberian penghinaan. Bukahkah komisi negara bagi perpustakaan rakyat telah mengungkapkan sebuah kisah "Petruk dadi Ratu" dan Petruk ini tidak dibenci oleh orang Belanda yang cerdas? Bukankah kisah yang diterbitkan oleh negara itu bukan hanya dimaksudkan untuk merendahkan pemerintah di Hindia? Mengapa pemerintah kemudian juga tidak mengeluh terhadap komisi perpustakaan rakyat ini?

Dalam berita di atas jelas diketahui bahwa pemerintah masih memiliki dugaan bila kisah Petruk menjadi raja merupakan bentuk penghinaan yang merendahkan wibawa orang Belanda, karena penampilan Petruk yang diidentikkan dengan sifat-sifat fisik orang Eropa, atau dengan kata lain orang Belanda di sini adalah sosok abdi dari negeri induk yang diberi jabatan di tanah koloni.

Analisis di atas bisa juga diterapkan untuk mengamati bukan hanya kisahnya tetapi juga bentuk wayang kulit Petruk baik yang dibuat di Surakarta maupun di Yogyakarta. Pada kedua kerajaan, Petruk dibuat dengan memakai sepatu yang terlepas dari filosofis lain, bisa menjadi identifikasi dengan pejabat Belanda di Hindia. Fisiknya yang tinggi dan berhidung panjang lebih memudahkan seniman dan para perancang Jawa untuk mengidentikkan dengan orang Barat yang terutama memegang jabatan di Jawa.

Ditinjau dari busananya, dengan menerapkan semiotic De Saussure yang telah disampaikan di atas, bisa diketahui bahwa bentuk busana tersebut menyiratkan symbol-simbol kekuasaan yang dimiliki oleh Belanda. Pemakaian cincin di hidung, baik pada wayang gaya Yogyakarta maupun Surakarta, menunjukkan adanya perilaku orang yang kebingungan menerima kedudukan karena latar belakangnya yang tidak sesuai dengan jabatan yang diberikan. Begitu juga dengan sepatu dan pedang yang digunakan sebagai penanda, yang tidak menunjukkan senjata khas Petruk, merupakan bentuk identifikasi dengan orang Eropa sekaligus sindiran ketika diterapkan dalam konteks petanda zaman dan struktur yang ada.

Pada kisah yang disampaikan lewat cerita Petruk menjadi raja, juga ditemukan identifikasi dengan kehadiran kekuasaan Belanda di Vorstenlanden. Di Kesultanan Yogyakarta, Petruk dikisahkan menjadi raja dan menduduki tahta di negara Loji Tengara.<sup>28</sup> Kata "Loji" sering digunakan dalam pembicaraan baik resmi maupun tidak resmi di kalangan orang Jawa di Yogyakarta untuk menyebut benteng *Vredeburg* yang berada di seberang kraton Yogyakarta.<sup>29</sup> Benteng *Vredeburg* menjadi tempat kedudukan pasukan garnisun Belanda yang ditempatkan di Yogyakarta, sekaligus menjadi symbol kehadiran kekuasaan Belanda di sana. Karena sifat militerisnya yang tinggi, benteng ini dilengkapi dengan lonceng yang pada jam tertentu didentangkan oleh petugas benteng untuk menandai waktu. Lonceng yang suaranya terdengar hingga ke lingkungan sekitar benteng ini dalam bahasa Jawa disebut sebagai *tengara*. Dengan demikian kerajaan Petruk di Loji Tengara bisa merujuk pada benteng *Vredeburg*, dan otomatis Petruk diidentikkan dengan penguasa Belanda di sana.

Dalam kisah Petruk menjadi raja ini, Petruk digambarkan memiliki kesaktian karena menguasai pusaka Kalimasada dan memerangi berbagai negara yang rajanya berhasil dia kalahkan dan dia tundukkan karena pusaka tersebut. Setelah raja-raja ini tunduk, maka Petruk tidak membunuh mereka tetapi menjadikannya sebagai vassal sementara tahta kerajaan dikuasai olehnya, dengan kata lain para vassal itu tetap duduk di atas tahtanya namun atas perkenannya.<sup>30</sup> Melalui interpretasi simbolis de Saussure, hal ini menggambarkan kebijakan politik kolonial Belanda yang berlangsung sampai abad XX terhadap para penguasa swapraja (*zelfbestuur*) di Indonesia.

W. Meijer Ranneft seorang ilmuwan Belanda membuat sebuah tulisan khusus mengenai pementasan wayang orang dengan judul Petruk Dadi Ratu yang diterbitkan pada tahun 1906 di Leiden. Setelah melihat pementasan kisah ini yang ditampilkan di pendopo Kabupaten Magelang, Ranneft menuliskan sebagai berikut

*Men had het stuk ook wel "Een parvenu op den troon" kunnen betitelen en het is te begrijpen, dat zulk een onderwerp voor het van nature beleefde Javaansche volk een groote attractive bezit. Als Petroek in zijn hooge positive telkens tegen de etiquette zondigt, allerlei onhandigheden begat en toch maar steeds aardigheden debiteert, staan de toeschouwers te schudden van het lachen. Dan zijn zee en en al aandacht en gaan op in het met zorg bestudeerde spel van de hoofpersonen. Zelfs een Europeesch toeschouwer geraakt onwillekeurig onder de bekoring van dit schouwspel, ook al begrijpt hij niet alles wat er gezongen en gesproken wordt.<sup>31</sup>*

Karya ini juga bisa disebut "lelucon di atas tahta" dan bisa dipahami bahwa kisah ini memiliki pesona sangat bear bagi rakyat Jawa. Ketika Petruk dalam posisinya tertinggi berulang kali melanggar etika, melakukan banyak kesalahan tetapi tetap berbasa-basi, penonton tertawa terbahak-bahak. Nanun perhatian mereka kemudian tercurahkan pada acting pelaku utama yang dipelajari secara cermat. Bahkan penonton Eropa terpaku pada adegan ini meskipun tidak paham apa yang diucapkan dan dilantunkan.

Meijer Ranneft tidak mau menyinggung aspek politik dari pementasan kisah ini, juga tidak menyentuh pesan utama pembuatnya, namun dia mengisahkan bahwa pementasan itu berasal dari kraton Yogyakarta dan atas perintah Sultan Hamengku Buwono VII cerita itu digubah dalam bentuk tembang Jawa. Mengingat pada awal abad XX Magelang bukan lagi merupakan bagian dari Kesultanan Yogyakarta, yang telah dipisahkan sejak 1 Agustus 1812<sup>32</sup>, melalui pementasan ini masih ditemukan hubungan psikologis dan kultural antara Magelang dan Kesultanan Yogyakarta, khususnya elite penguasa yang memerintah di sana.

Pesona dari kisah ini di kalangan public pada pertengahan pertama abad XX terutama setelah mengalami banyak pementasan di luar kraton menjadi topic pembahasan umum dan

tidak lagi bisa dicegah oleh pemerintah kolonial. Diskusi dalam berbagai surat kabar dan majalah public yang terbit dan memiliki banyak pembaca pada dekade 1920-an juga mencakup pembahasan kisah Petruk menjadi raja tersebut<sup>33</sup>, dan ini bisa dianggap sebagai keberhasilan dalam inisiatif raja-raja Jawa dalam respon mereka terhadap rezim penguasa kolonial.

Semangat ini menjawai para tokoh pergerakan nasional khususnya di bidang seni dan budaya Jawa yang berjuang demi eksistensi kebudayaan dalam kehidupan yang didominasi oleh kolonialisme. Seorang tokoh pejuang kebudayaan Sastroamodjojo juga membuat tulisan dalam surat kabar publick dengan terilhami oleh sosok Petruk ini:

*In den tegenwoordigen tijd zal het natuurlijk ook wel kunnen gebeuren en dit is ook hetgeen wij wenschen. Met Petroek, vergelijken wij de Kromo's van deze eeuw. Deze vergelijking brengt ons als Kromo's, een beetje in de war, wanneer wij bedenken dat wij in dezen socialistischen tijd inderdaad radjas. En dan zal de aristocratische partij wel verdwijnen. Met vorst zijn in den tegenwoordigen tijd bedoelen wij het behoorlijk bestaan of "prijaji" zijn, of gelukkig. Thans hebben wij om zulks te verkrijgen geen bloed meer te vergieten, doch is alleen ontwikkeling noodig.<sup>34</sup>*

Hal ini bisa terjadi pada masa sekarang dan itulah yang kita inginkan (rakyat menjadi raja). Kita menyamakan Petruk masa kini dengan kaum Kromo. Perbandingan ini akan sedikit membingungkan apabila kita sekarang sebagai Kromo menjadi raja di era sosialis dan kaum aristokrat akan lenyap. Menjadi raja di masa sekarang yang kita maksudkan adalah bisa hidup layak atau bahagia dan menjadi "prijayi". Kita tidak lagi perlu menumpahkan darah untuk mencapainya, melainkan berkembang maju.

Melihat nuansa tulisannya, Sastroamidjojo jelas bulan berlatar belakang feudal atau kerajaan melainkan dari kelompok bawah,

karena menggunakan kata *Kromo*, yaitu istilah yang sering dipakai oleh para pejuang di masa pergerakan khususnya dari kalangan kiri untuk menuju kelompok proletar atau rakyat. Dengan begitu tokoh Petruk dalam kisah ini menjadi idola mereka yang menghendaki adanya kekuasaan oleh rakyat atau golongan proletar.

## Penutup

Dari penjelasan di atas bisa diketahui terutama bahwa wayang, baik tokoh maupun kisahnya bisa digunakan untuk dan oleh berbagai kepentingan. Beberapa unsur dalam struktur social yang tampil sebagai *agent* menurut Christopher Lloyd ikut terlibat dalam menggunakan tokoh Petruk dan menentarkan kisahnya sebagai raja dalam pertunjukan public. Keduanya, yang oleh Ferdinand de Saussure dianggap sebagai tanda, memunculkan interpretasi atau penanda ketika ditampilkan dalam ranah public, apakah sebagai bentuk fisik wayang atau dalam pementasan kisah.

Akan tetapi makna yang diperoleh dari keduanya sebagai penanda baru bisa dijelaskan arti dan relevansinya ketika diletakkan dalam konteks struktur tertentu, yang disebut petanda. Dari situ maka makna Petruk dan kisahnya sebagai raja akan diketahui maksud dari pengarangnya dan sasaran penggunaannya. Situasi yang memungkinkan munculnya struktur tersebut adalah adanya benturan dua struktur: kolonial dan feudal, atau antara raja-raja Jawa yang berada di bawah tekanan dalam berbagai aspek kehidupan oleh rezim kolonial.

Meskipun di bawah tekanan demikian, raja-raja Jawa saat itu (Paku Buwono IX dan Hamengku Buwono VII) tetap masih mampu mempertahankan eksistensinya karena kekuasaan (*power*) yang dimilikinya, dan ironisnya diakui secara resmi oleh pemerintah kolonial Belanda. Penggunaan *power* oleh kedua raja ini memungkinkan mereka menciptakan rekayasa dan inisiatif tentang wayang dan kisah Petruk sebagai raja, yang kemudian meluas keluar dari wilayah Vorstenlanden dan akhirnya menjangkau kalangan luas yang menjadi memori kolektif mereka.

Kemunculan dan penyebaran wayang Petruk sebagai raja dan kisahnya menjadi bukti bahwa raja-raja Jawa sebagai *agent* mampu memanfaatkan *power* yang masih melekat kepadanya dan didukung oleh struktur yang ada pada masa itu (yakni massa rakyat baik di Vorstenlanden maupun di luarnya) sehingga melakukan *agency* atau interaksi terhadap struktur yang ada sehingga menghasilkan struktur baru, seperti yang disampaikan oleh Christopher Lloyd. Ditinjau dari sudut pandang ini, Petruk Dadi Ratu menjadi suatu hasil dari proses interaksi (*agency*) pada agen budaya Jawa menghadapi struktur kolonial yang mendominasi pada saat itu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aa, A.J. van der, 1857, *Nederlands Oost Indie of Beschrijving der nederlandsche Bezittingen in Oost Indie, vierde deel*, Breda, Broese en Comp.
- Administratie verslag der Residentie van Djocjakarta over het jaar 1857*,
- “Advertentie” dalam *De Locomotief*, tanggal 1 Maret 1910
- Algemeen Verslag der Residentie van Djocjakarta over het jaar 1830, 1831 en 1832
- Algemeen Verslag der Residentie van Djocjakarta over het jaar 1848
- Algemeen Verslag der Residentie van Djocjakarta over het jaar 1850*
- Algemeen Verslag der Residentie van Soerakarta over het jaar 1835*
- Bonnefoy, Yves, 1993, *Asian Mythologies*, Chicago, The University of Chicago Press
- Culler, Jonathan, 1986, *Ferdinand de Saussure*, Ithaca, Cornell University Press
- “De waarheid en moed” dalam *Nieuwe Vorstenlanden*, tanggal 11 November 1884
- Ekawati Marhaenny Dukut, 2020, *Kebudayaan, Ideologi, Revitalisasi dan Digitalisasi Seni Pertunjukan Jawa dalam Gawai*, Semarang, The Java Institute Unika Soegijapranata
- Fillet, P.W., 1895, *De Verhouding der Vorsten op Java tot de Ned. Indische Regeering*, 's Gravenhage, Martinus Nijhoff
- Haspel, C. Ch. Van den, 1985, *Overwicht in Overleg: hervormingen van justitie, grondgebruik en bestuur in de Vorstenlanden op Java 1880-1930*, Dordrecht, Foris Publications
- Hatley, Barbara, 2008, *Javanese Performances on an Indonesian Stage : Contesting Culture, Embracing Change*, Singapore, NUS Press
- “Het drukpersdelicht Douwes Dekker” dalam *De Nieuwe Vorstenlanden*, tanggal 20 Februari 1913.
- Houben, Vincent J..H., 1994, *Kraton and Kumpeni: Surakarta and Yogyakarta 1830-1870*, Leiden, KITLV Press
- Kalff, S., “Wajang Orang” dalam *Het Toneel*, September 1925, tahun ke-4
- Lloyd, Christopher, 1989, *The Structures of History*, Oxford, Blackwell
- Louw, P.J.F. en E.S. de Klerck, 1909, *De Java Oorlog van 1825-1830*, zesde deel, 's Gravenhage, Martinus Nijhoff
- Miller, Dean A. 2003, *The Epic Hero*, Baltimore, John Hopkins University Press
- “Nederlandsch Indie”, dalam *Nieuwe Vorstenlanden*, tanggal 5 November 1884
- “Nederlandsch Indie, Soerakarta 10 November 1884” dalam *Nieuwe Vortenlanden*, tanggal 10 November 1884
- “Nederlandsch Indie” dalam *De Nieuwe Vorstenlanden*, tanggal 12 November 1884
- “Petroek dados Ratoe” dalam *Kadjawen*, tanggal 4 November 1926 nomor 44
- “Petroek vorst geworden” dalam *Sinar Hindia*, tanggal 26 Juni 1919, nomor 121

Ranneft, W. Meijer, "Praboe Dewa Soekma of Petroek alst Vorst (uit de Wayang Orang), dalam *Bijdrage voor Koninklijk Instituut tot Indische Taal, Land en Volkenkunde*, tahun 1906, vol. 59

Sartono Kartodirdjo, 1973, *Protest Movements in Rural Java: A Study of Agrarian Unrest in the Nineteenth and early Twentieth Century*, Kuala Lumpur, Oxford University press

*Staatsblad van Nederlandsch Indie* tahun 1857

*Staatsblad van Nederlandsch Indie*, tahun 1884

Stibbe, D.G., en H.J. de Graaf, 1921, *Encyclopaedie van Nederlandsch Indie*, vierde deel, 's Gravenhage, Martinus Nijhoff

"Stoprenten en Caricaturen" dalam *De Nieuwe Vorstenlanden*, tanggal 31 Oktober 1884

Trubetzkoy, N.S., 1971, *Principles of Phonology*, Berkeley, Universwity of California Press

## CATATAN AKHIR

<sup>1</sup> Dalam dunia pewayangan Jawa, terutama sejak era Mataram Islam, keberadaan *panakawan* yang dilambangkan sebagai abdi juga memiliki fungsi sebagai penasehat, penjaga dan pengarah bagi para ksatria dan raja yang diikutinya. Bahkan dalam kisah tertentu, *panakawan* difungsikan sebagai penghujung antara raja-raja atau ksatria dengan kalangan dewa, karena asal-usul mereka memungkinkan untuk itu. Dean A. Miller, *The Epic Hero* (Baltimore, 2003, John Hopkins University Press), halaman 36.

<sup>2</sup> Kisah ini sebenarnya merupakan ketidaksengajaan karena Petruk tidak mencuri pusaka itu melainkan memperoleh dari pemberian sosok ksatria yang diikutinya. Namun karena memang bukan menjadi haknya, maka statusnya sebagai raja tidak lama dan Kalimasada segera kembali ke tangan orang yang berhak milikinya. Yves Bonnefoy, *Asian Mythologies* (Chicago, 1993, The University of Chicago Press), halaman 181

<sup>3</sup> Harapan kedatangan Ratu Adil merupakan bentuk gerakan Mesianisme yang menantikan kedatangan penguasa yang bisa membebaskan rakyat dari penderitaan dan mewujudkan zaman baru yang penuh keadilan dan kesejahteraan. Ini menjadi kontradiksi dari struktur yang ada, dan otomatis menganggap bahwa struktur dan para penguasa yang memerintah tidak lagi mencerminkan harapan rakyat sehingga harus diganti dan disingkirkan. Sartono Kartodirdjo, *Protest Movements in Rural Java: A Study of Agrarian Unrest in the Nineteenth and early Twentieth Century* (Kuala Lumpur, 1973, Oxford University press), halaman 66.

<sup>4</sup> Dalam pergolakan umum yang menyertai tuntutan reformasi pada awal tahun 1998 di Yogyakarta, sosok Petruk menjadi raja ini didengungkan oleh mahasiswa dan rakyat yang berdemonstrasi menentang kepemimpinan Presiden Suharto. Mereka menghadirkan tokoh Petruk dadi Ratu yang dianggap sebagai symbol Ratu Adil untuk menggantikan rezim penguasa yang korup dan dictator, Peristiwa ini terjadi di Yogyakarta dan menjadi symbol perlawanan daerah terhadap dominasi pusat. Barbara Hatley, *Javanese Performances on an Indonesian Stage : Contesting Culture, Embracing Change* (Singapore, 2008, NUS Press), halaman 173

<sup>5</sup> Christopher Lloyd, *The Structures of History* (Oxford, 1989, Blackwell), halaman 93.

<sup>6</sup> Jonathan Culler, *Ferdinand de Saussure* (Ithaca, 1986, Cornell University Press), halaman 28.

<sup>7</sup> N.S. Trubetzkoy, *Principles of Phonology* (Berkeley, 1971, Universwity of California Press), halaman 2

<sup>8</sup> Vincent J..H. Houben, *Kraton and Kumpeni: Surakarta and Yogyakarta 1830-1870* (Leiden, 1994, KITLV Press), halaman 50

<sup>9</sup> P.J.F. Louw en E.S. de Klerck, *De Java Oorlog van 1825-1830, zesde deel* ('s Gravenhage, 1909, Martinus Nijhoff), halaman 70-71

<sup>10</sup> P.W. Fillet, *De Verhouding der Vorsten op Java tot de Ned. Indische Regeering* ('s Gravenhage, 1895, Martinus Nijhoff), halaman 285.

<sup>11</sup> P.W. Fillet, *ibid.*, halaman 291

<sup>12</sup> ANRI, *Algemeen Verslag der Residentie van Soerakarta over het jaar 1835*, bundel Surakarta nomor 380

<sup>13</sup> ANRI, *Algemeen Verslag der Residentie van Djocjakarta over het jaar 1830, 1831 en 1832*, bundel Yogyakarta nomor 272, halaman 33-35.

<sup>14</sup> ANRI, *Algemeen Verslag der Residentie van Djocjakarta over het jaar 1848*, bundel Yogyakarta nomor 284.

<sup>15</sup> *Staatsblad van Nederlandsch Indie* tahun 1857 no. 116

<sup>16</sup> G.P. Rouffaer, "Vorstenlanden" dalam D.G. Stibbe en H.J. de Graaf, *Encyclopaedie van Nederlandsch Indie, vierde deel* ('s Gravenhage, 1921, Martinus Nijhoff), halaman 628.

<sup>17</sup> ANRI, *Algemeen Verslag der Residentie van Djocjakarta over het jaar 1850*, bundel Yogyakarta nomor 286

<sup>18</sup> Di awal masa pemerintahannya, Sunan Paku Buwono IX diminta menerima pengangkatan asisten residen yang akan menangani masalah hukum di Surakarta. Sebagai reaksinya, Sunan menambah jumlah korps keamanan pribumi. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah intervensi intern kolonial terhadap sistem hukum Kesunanan, dan menjadi agenda pembicarannya dengan Residen A.A.M.N. Keuchenius pada awal 1870an. C. Ch. Van den Haspel, *Overwicht in Overleg: hervormingen van justitie, grondgebruik en bestuur in de Vorstenlanden op Java 1880-1930* (Dordrecht, 1985, Foris Publications), halaman 52-53.

<sup>19</sup> ANRI, *Administratie verslag der Residentie van Djocjakarta over het jaar 1857*, bundel Yogyakarta nomor 191.

<sup>20</sup> *Staatsblad van Nederlandsch Indie*, tahun 1884, nomor 9.

<sup>21</sup> "Stoprenten en Caricaturen" dalam *De Nieuwe Vorstenlanden*, tanggal 31 Oktober 1884, lembar ke-2

<sup>22</sup> "Nederlandsch Indie, Soerakarta 10 November 1884" dalam *Nieuwe Vorstenlanden*, tanggal 10 November 1884, lembar ke-2

<sup>23</sup> "Nederlandsch Indie", dalam *Nieuwe Vorstenlanden*, tanggal 5 November 1884, lembar ke-2

<sup>24</sup> "De waarheid en moed" dalam *Nieuwe Vorstenlanden*, tanggal 11 November 1884, lembar ke-1

<sup>25</sup> "Nederlandsch Indie" dalam *De Nieuwe Vorstenlanden*, tanggal 12 November 1884, lembar ke-2

<sup>26</sup> Di taman kota Vorstenlanden, pentas wayang Petruk Dadi Ratu sebagai tontonan public sering ditampilkan dan dimuat dalam surat kabar. "Advertentie" dalam *De Locomotief*, 1 Maret 1910, lbr.8

<sup>27</sup> "Het drukpersdelicht Douwes Dekker" dalam *De Nieuwe Vorstenlanden*, tanggal 20 Februari 1913, lembar ke-1

<sup>28</sup> Suwardi Endraswara, *Petruk Dadi Ratu* (Yogyakarta, 2014, Media Presindo), halaman 8

<sup>29</sup> Kata "loji" sendiri sebenarnya bermakna pada kantor dagang VOC yang dibangun di sejumlah pelabuhan pesisir utara Jawa pada awal abad XVII. Dalam perkembangannya, kata ini meluas dimaknai sebagai rumah orang Eropa yang besar dan luas sehingga mirip pesanggrahan. Ekawati Marhaenny Dukut, *Kebudayaan, Ideologi, Revitalisasi dan Digitalisasi Seni Pertunjukkan Jawa dalam Gawai* (Semarang, 2020, The Java Institute Unika Soegijapranata), halaman 12

<sup>30</sup> S. Kalff, "Wajang Orang" dalam *Het Toneel*, September 1925, tahun ke-4, halaman 54

<sup>31</sup> W. Meijer Ranneft, "Praboe Dewa Soekma of Petroek alst Vorst (uit de Wayang Orang)", dalam *Bijdrage voor Koninklijk Instituut tot Indische Taal, Land en Volkenkunde*, tahun 1906, vo. 59, serie 1, halaman 152-153

<sup>32</sup> A.J. van der Aa, *Nederlands Oost Indie of Beschrijving der nederlandsche Bezittingen in Oost Indie* vierde deel (Breda, 1857, Broese en Comp.), halaman 99

<sup>33</sup> "Petroek dados Ratoe" dalam *Kadjawen*, tanggal 4 November 1926 nomor 44.

<sup>34</sup> "Petroek vorst geworden" dalam *Sinar Hindia*, tanggal 26 Juni 1919, nomor 121